



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SUB UNIT KERJA : BP2MK WILAYAH V

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **GUNAWAN SUDHARSONO**
2. Jabatan : **KEPALA BP2MK WILAYAH V**
3. NHK : **209487**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 403.935.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 204 m²/204 m² di SEMARANG ,
WARISAN Rp. 403.935.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 146.000.000**

1. MOBIL, ISUZU PANTHER MINIBUS Tahun 2004, HASIL SENDIRI
Rp. 0
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 0
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 16.000.000
5. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 0
6. MOBIL, TOYOTA AGYA SEDAN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 9.800.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 50.868.992****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 610.603.992**

III. HUTANG **Rp. 30.030.000**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

580.573.992

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **TIDAK LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **31 Desember 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.